

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Perbaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Mahrus, Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ed. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Purnama, I Ketut Adi. *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soekanto, Prof. Dr. Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 16. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soekantor, Prof. Dr. Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persanda, 2007.

### JURNAL

- Yuliantor, Hernowo. “*Laporan Analisa dan Evaluasi Data Kriminalitas Tindak Pidana Umum Pada Ditreskrim dan Satreskrim Jajaran Polda Kepri Bulan Oktober 2018*”.
- Kristiani, Ni Made. “*Kejahatan Kekerasa Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, Jilid 7.

### INTERNET

- Admin. “*Ini 3 Agenda Paket Reformasi Jilid II*”  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt587e0fdb06ea8/ini-3-agenda-paket-reformasi-hukum-jilid-ii/>. Diunggah pada 17 Januari 2017.
- Pencawan, Yudi. “*Cara Membedakan Delik Formil dan Delik Materiil*”.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569f12361488b/cara-membedakan-delikformil-dan-delik-materil>. Diunggah 9 Mei 2016.
- Prihantoro, Bagus. “*Perjalanan Amandemen UUD 1945 Saat Amien Rais Jadi Ketua MPR*”. <https://news.detik.com/berita/d-4012055/perjalanan-amandemen-uud-1945-saat-amien-rais-jadi-ketua-mpr>. Detik News: Diunggah pada 9 Mei 2018.

Purnamasari, Desi. “Memeriksa Keterlibatan Polri dalam Pengelolaan Dana Desa”. <https://tirto.id/memeriksa-keterlibatan-polri-dalam-pengelolaan-dana-des-a-cFti>. Tirto: Diunggah pada 1 Maret 2018.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU Nomor 2 Tahun 2002.

Indonesia. Pemolisian Masyarakat. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015.

Indonesia. Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat. Keputusan Kapolri No. Pol. SKep/737/X/2005.

Indonesia. Buku Pintar Bhabinkamtibmas. Keputusan Kapolri Nomor Skep/773NII/2016.